FINEST

Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam

Vol. 4, No.2 (2020)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

Management of Productive Muhammadiyah Waqf In Kuantan Singingi Regency

Irwandi

Dosen Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Indonesia

irwandilibra@gmail.com

Accepted: November 29th, 2020. Approved: December 15th, 2020. Published: December 30th, 2020

Abstract

The purpose of this research in how the management of productive waqf muhammadiyah in kuantan singingi regency. The method used id a field study with qualitative data analysis.the resultls of this study indicate that there are still many management of waqf that are consumptive in nature. This is due to the weakness of human resources in the management of waqf and the lack of cleae operational standards and leadership styles in PD Muhammadiyah kuantan singingi regency. And from the government side, it is still centralized and there is no control system.then the waqf institutions in PD Muhammadiyah have not optimally managed the waqf assets in a productive direction. The steps taken by the management are still in the waqf land certification program and planning aqidah in the community, such as religius events, trainings, da'wah and other. And the management of waqf lan in PD Muhammadiyah kuantan singingi regency, the majority of the donated land is used for consumptive needs such as mosques, prayer rooms, islamic boarding schools, funerals, educational institutions and others.

Keyword: waqf and productive

**Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah
Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah studi lapangan dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pengelolaan wakaf yang bersifat konsumtif. Hal ini disebabkan karena lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf tersebut serta belum memiliki standar operasional yang jelas serta gaya kepemimpinan di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi. Dan dari pihak pemerintah masih bersifat sentralistik serta belum adanya sistem kontrol. Kemudian lembaga wakaf yang ada di PD Muhammadiyah belum optimal mengelola aset wakaf kearah produktif. Langkah-langkah yang dilakukan pengurus masih pada program sertifikasi tanah wakaf dan penanaman aqidah pada masyarakat seperti acara keagamaan, pelatihan-pelatihan, dakwah, dan lain-lain. Dan pengelolaan tanah wakaf di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas tanah wakafnya di manfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti masjid, musholla, pesantren, pemakaman, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Kata kunci : wakaf dan Produktif

PENDAHULUAN

Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan penting dimata Umat Islam. Sebab wakaf memiliki potensi yang sangat luas untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa dan kesejahteraan sosial. Salah satu lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada ajaran Islam adalah lembaga perwakafan yang dapat membantu menanggulangi kemiskinan pada suatu negara. Saat ini Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang atau terjadi ketimpangan. Sebab terjadinya ketimpangan karena basis ekonominya di monopoli oleh sebagian kalangan *feodalis-tradisional* yaitu kelompok yang menguasai basis ekonomi di daerah pedesaan secara turun temurun dengan menguasai sebagian besar tanah dan sawah, serta kalangan masyarakat *modern-kapitalis* yang diuntungkan oleh sistem ekonomi uang di satu pihak dan lembaga perbankan dengan sistem ribawi di pihak yang lain (Djunaidi, dkk, 2007).

Ketimpangan sosial yang disebabkan oleh sistem dan bentuk ekonomi kapitalis biasanya di tandai oleh beberapa hal yaitu *pertama*, penerapan efisiensi manajemen dan modal. Asumsinya adalah jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan ketrampilan kerja yang setinggi mungkin. Sehingga tenaga kerja yang sedikit kurang ahli atau kurang setia, harus segera dicarikan penggantinya. Akibatnya dalam sistem ekonomi yang beralasan riba, secara politis posisi kaum buruh cenderung di perlemah. *Kedua*, para pengusaha berusaha menciptakan alienasi (keterasingan produksi) bagi para pekerja karena didesak oleh panasnya riba yang menyertai modal usahanya. Prakteknya pengusaha melakukan strategi berupa, di satu

pihak menekan harga bahan baku yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya, sedangkan di pihak lain harga komoditi yang mereka produksi di jual dengan harga setinggi-tingginya.

Dalam kondisi seperti inilah, seseorang yang mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas akan mampu bersaing dan yang memiliki Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas akan kalah dalam menghadapi persaingan. Dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan yaitu antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja tidak sebanding, bahkan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut karena alasan keterpurukan ekonomi. Selain itu dampak pembangunan juga merugikan kaum *dhuafa* (miskin) karena kita lihat semakin banyaknya pengangguran, pembersihan pedagang kaki lima, tersingkirnya pedagang kecil (retail) oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul dimana-mana sehingga pedagang retail banyak yang gulung tikar.

Melihat kondisi di atas, sejauh ini Islam menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa keluar dari keterpurukan, dimana banyak sarana yang disediakan dan dirasakan mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi umat Islam seperti wakaf dan zakat. Peran lembaga wakaf ini berusaha meningkatkan pengelolaan wakaf untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Menurut Rofiq (2004), Mantan Menteri Agama Said Agil Husein al-Munawar dalam pagelaran Workshop Internasional Pemberdayaan Umat melalui pengelolaan wakaf produktif yang di selenggarakan oleh *The International of Islamic Thought* (IIIT) bekerjasama dengan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI di Wisma Haji Batam pada tanggal 7-8 Januari 2002 dalam sambutan pengarahannya mengatakan bahwa:

"Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan yang mempunyai nilai ekonomis memang perlu di lakukan. Hal ini mengingat bahwa krisis ekonomi yang di alami oleh bangsa Indonesia secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin, pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, namun mengingat terbatasnya dana yang tersedia dalam APBN, maka masalah kemiskinan belum dapat teratasi dengan baik. Salah satu alternatif yang diharapkan untuk mengatasi kemiskinan itu adalah adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat. khususnya masyarakat golongan kaya yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Maka dari itu saya berpendapat bahwa salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah perlunya mengembangkan pengelolaan dana wakaf tunai atau pengelolaa wakaf produktif".

Dalam sejarah Islam wakaf pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba yang dibangun atas dasar taqwa kepada Allah SWT agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama (Munzir Wakaf, 2009). Kemudian disusul dengan pembangunan masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari Bani Najjar setelah dibeli oleh Rasulullah SAW dengan harga 800

dirham, dengan demikian Rasulullah SAW telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid (Halim, 2005). Masjid merupakan pusat segala kegiatan bagi umat Islam, sebab

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Dengan kehadiran Bank Muamalat Indonesia telah memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah. Semula harapan ini hanya tertumpu pada BMI. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK: 013/1992, tanggal 24 April 1992 masjid adalah tempat ibadah kaum muslim yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam (Ayub, 1996). Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat 1 (1991), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Hukum Islam. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf didefinisikan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum meMuhammadiyahrut syari'ah.

Realita di lapangan, pengelolaan wakaf kurang optimal karena disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang kurang profesional, biasanya dikuasai oleh pihak keluarga sehingga kurang berkembang dan kurang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Karena itu, wakaf sebenarnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal ini dapat terlaksana apabila pengelolaan wakaf dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia yang begitu luas dan menempati beberapa lokasi yang strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Pengelolaan wakaf ini bisa dilakukan oleh pihak perorangan, organisasi, dan berbadan hokum (Departemen Agama RI, 2007).

Diantara pengelola yang berbentuk organisasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Badan Perwakafan Muhammadiyah yang berada di Teluk Kuantan. Badan Perwakafan Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar di Kuantan Singingi, di dalamnya terdapat sub bagian yang bertugas sebagai nazhir (pengelola) wakaf. Badan Perwakafan Muhammadiyah ini wakaf yang diterima dari para wakif yang telah memberi amanah kepadanya mayoritas adalah wakaf tanah yang pendayagunaannya untuk masjid, lembaga pendidikan dan lembaga social dan perekonomian dan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya keberlangsungan Badan Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi . Beberapa tanah wakaf yang menempati lokasi strategis yang dimiliki oleh Badan Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi dikelola dan dikembangkan secara produktif.

Dari fenomena diatas mengenai pengelolaan wakaf produktif, masih terdapat pengelolaan wakaf yang kurang optimal disebabkan oleh Sumber Daya Manusia yang tidak profesional. Beberapa penelitian yang mendukung fenomena diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Oktriani (2017), bakhri dan srifariyati (2017) dan mayari & qulub (2019) tentang pengelolaan wakaf produktif. Peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah, mengingat hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas serta hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka penulis mengangkat judul: “Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah Di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi lapangan dengan analisis data kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Produktif Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi

Secara garis besar program pengurus Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi periode 2015-2020. Dalam setiap lembaga dan Majelis yang ada dalam Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai rancangan dan beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap lembaga dan Majelis pada masa kepengurusan, guna untuk menjalankan keberlangsungan Muhammadiyah di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel. 3.1 Garis Besar Program Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tujuan program	Jenis program	Sasaran program	Pelaksana program
1	Meningkatkan kualitas mubaligh dan metode dakwah ala Muhammadiyah	Majelis Dakwah Muhammadiyah 1. Menginventarisasi Mubaligh Muhammadiyah 2. Menerbitkan Teks Khutbah Sholat Hari Raya 3. Mengadakan Pelatihan Dakwah	1. Mubaligh Muhammadiyah 2. Khotib Muhammadiyah 3. Calon Mubaligh dan Pengurus 4. Muhammadiyah	LD Muhammadiyah

2	<p>Mengusahakan terwujudnya Pendidikan Islam sesuai Faham Ahlusunah Wal Hama'ah dan Pendidikan murah</p>	<p>Majelis Pendidikan Ma'arif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Pembelajaran materi Aswaja di sekolah dan madrasah milik Muhammadiyah 2. Membangun jaringan kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya 3. Melakukan penataan lembaga pendidikan Muhammadiyah dan Namborisasi pendidikan Muhammadiyah 4. Mendirikan Lembaga Pendidikan formal di lokasi kantor Muhammadiyah (RA, MI Muhammadiyah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajar / madrasah Muhammadiyah 2. Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, BAS, Kepala Sekolah 3. Kepala Sekolah / Madrasah 4. Sekolah/madrasah Muhammadiyah 5. Sarjana Pendidikan Muhammadiyah dan calon siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP Ma'arif dan Sekolah/Madrasah 2. LP Ma'arif
3	<p>Mengusahakan terwujudnya peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan</p>	<p>MajelisPerekonomian Muhammadiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Koperasi Muhammadiyah 2. Bekerja sama dengan lembaga ekonomi lainnya 3. Memfasilitasi Pemanfaatan lembaga ekonomi untuk warga Muhammadiyah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peternak ikan 2. Peternak ayam 3. Penanam modal 4. Pertokoan 	<p>Lembaga Perekonomian Muhammadiyah</p>

4	Terselamatkan aset tanah warga Muhammadiyah dan tanah wakaf warga Muhammadiyah	Majelis Waqaf dan Pertanahan Muhammadiyah 1. Melakukan pendataan aset-aset tanah Muhammadiyah 2. Mendorong dan membantu sertifikasi wakaf tanah masjid/musholla, madrasah dan lembaga lainnya milik warga Muhammadiyah	1. Aset tanah Muhammadiyah 2. Takmir atau pemilik masjid/musholla warga Muhammadiyah	LWP Muhammadiyah
5	1. Meningkatkan kualitas warga Muhammadiyah dalam hal pengkajian masail diniyah 2. Menggali hukum Islam terhadap masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan politik	Majelis Bahtsul Masa'il Muhammadiyah 1. Mengoptimalkan Fungsi Lembaga Bahtsul Masail Diniyah Muhammadiyah 2. Mengikuti Kegiatan Bahtsul Masail yang diadakan oleh PC Muhammadiyah dan Pondok Pesantren	1. Santri pondok pesantren dan pengurus muhammadiyah 2. Anggota LBM Muhammadiyah	LBM Muhammadiyah

Sumber Data: (Laporan Konferensi Muhammadiyah Masa Khidmat 2015- 2020)

Jadi wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya dan diserahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara'. Wakaf mencakup harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil hasilnya secara berulang-ulang. Wakaf sebagai salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan putus selama barang (harta) wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Selanjutnya beberapa aset yang dimiliki oleh Badan Wakaf Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Bangunan

Bangunan yang dimiliki Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi :

a. Kantor

Kantor yang dimiliki sebagai penunjang kegiatan Muhammadiyah Kabupaten

Kuantan Singingi terdiri dari 3 ruangan antara lain :

- a) Satu ruang utama kantor dengan ukuran 9 m x 6 m yang berfungsi untuk Ruang Tamu, Ruang Tata Usaha, Ruang Ketua Pengurus.
 - b) Satu ruang kantor Pesantren KH. Amhad Dahlan dengan ukuran 6 m x 5 m
 - c) Satu ruang Majelis Guru Pesantren KH. Amhad Dahlan dengan ukuran 9 m x 8 m
- b. Aula
- a) Ada satu Aula /ruang serba guna dengan ukuran 24 m x 9 m. Aula ini digunakan serba guna, diantara sebagai gedung pertemuan pada waktu ada acara yang besar, olah raga, wisuda santri, dan lain-lain.
 - b) Ruang dapur berukuran 3,5 m x 8 m. Ruang dapur tersebut digunakan untuk fasilitas Muhammadiyah secara keseluruhan, baik Muhammadiyah maupun Pesantren.
 - c) Dua kamar MCK masing-masing putra dan putri berukuran masing-masing 3 m x 3 m. Kamar kecil ini bertempat di sebelah selatan Bangunan Pesantren KH. Ahmad Dahlan.
- c. Masjid

Ada satu bangunan Masjid dilingkungan Pesantren KH. Ahmad Dahlan, Masjid ini bernama Nurul 'Ilmi yang berukuran 20 m x 20 m. Masjid Nurul 'Ilmi ini dibangun untuk kegiatan Ibadah Pondok Pesantren KH. Ahmad Dahlan Teluk Kuantan serta sebagai tempat kegiatan keagamaan.

2. Tanah

**Berikut Tabel Rekapitulasi Tanah Wakaf PD Muhammadiyah
Kabupaten Kuantan Singingi.
Rekapitulasi Tanah Wakaf
PD Muhammadiyah Kuantan Singingi**

No	Cabang	Keperluan	Jumlah	Luas	Keterangan
1.	Kec. Kuantan Tengah	Masjid	1	2.500	
		Musholla	4	1.364	
		Panti Asuhan/PG/TK	2	9.638	
		MDA	1	363	
		Pondok Pesantren	2	15.042	
		Kebun	3	233.240	
2.	Kec. Kuantan Mudik	Musholla	6	873	

		Mesjid	4	2.390	
		Sekolah/MTsm	3	7.120	
		Langgar	1	1.200	
		MI Muhammadiyah	1	450	
		TK/MDA	3	1.778	
		Langgar	1	1.200	
		Kebun	2	21.200	
		Sawah	1	1.600	
3.	Kec. Benai	Mesjid	1	2.500	
		Perumahan	3	2.300	
		Musholla	1	210	
		TK	1	2.500	
		Kebun	5	116.750	
4.	Kec. Hulu Kuantan	Mesjid	2	2.500	
		MI Muhammadiyah	2	423	
		Surau	1	537	
		Musholla	1	863	
		Kebun	1	17.000	
5.	Kec. Gunung Toar	MtsM	1	2.300	
6.	Kec. Cerenti	Mtsm/SMK	2	8.550	
7.	Kec. Kuantan Hilir	Mesjid	1	240	

Sumber Data: Laporan konferensi PD Muhammadiyah Kuantan Singingi masa khidmat 2015- 2020)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tanah wakaf di Muhammadiyah Kuantan Singingi luasnya 602,422 M². Dimana tanah tersebut dimanfaatkan untuk masjid dengan jumlah 8 lokasi, musholla dengan jumlah 12 lokasi, pesantren dengan jumlah 2 lokasi, madrasah dengan jumlah 11 lokasi, sementara 12 lokasi dimanfaatkan untuk perkebunan. Wakaf memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dalam peningkatan tarah hidup dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara apabila wakaf dimanfaatkan dengan baik dan benar. Dari hasil wawancara dengan bapak Ahdanan Saleh, M.Ag selaku Sekretaris PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi berkata, "Di PD Muhammadiyah Kuantan Singingi memang ada

lembaga perwakafan, di Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi memang ada wakaf baik itu berupa perwakafan benda berupa tanah dan bangunan, dan dari hasil wakaf tanah ini, memang sebahagian ada yang telah dibangun berupa sarana ibadah, Sekolah-sekolah, maupun telah dibangun kebun Karet dan ada disalah satu cabang contohnya di Kecamatan Sentajo Raya dikembangkan program dibidang peternakan seperti peternakan sapi.

Namun secara umum tugas lembaga ini melayani pendataan apabila ada seseorang yang datang ke Muhammadiyah bertujuan untuk mewakafkan harta bendanya, semisal tanah maka pengurus PD Muhammadiyah datang ke lokasi bersama dengan perangkat desa untuk melaksanakan pengukuran tanah yang akan diwakafkan dan setelah selesai pengukuran serta mempersiapkan berkas-berkas, maka berkas tersebut dikirim ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapat pengesahan yang bersifat legal. Sebelum proses penyertifikatan berlangsung pihak Badan Pertanahan Nasional meninjau ulang lokasi tersebut apakah benar-benar diwakafkan dan tidak dalam sengketa untuk mengeluarkan sertifikat. Adapun yang mengelola wakaf di serahkan pada nazhir ranting masing-masing desa dan dalam pengembangannya dibantu oleh masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut. Beliau juga mengatakan dalam pengelolaan tersebut biasanya faktor penghambatnya adalah terbentur pada masalah dana dan proses penyertifikatan yang cukup lama yaitu sekitar 6 bulan bahkan bisa sampai 1 tahun, belum lagi kalau ada sengketa tanah karena pihak ahli waris yang tidak terima (menggugat), maka dari itu pihak nazhir harus teliti dalam proses pendataan (wawancara mohammad daim, 2020).

Untuk memelihara aset wakaf dengan baik, nazhir wakaf yang mempunyai tugas memelihara, mengelola, mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya harus mempunyai tekad yang bulat dan bekerja sama dengan semua pihak baik masyarakat, pengelola sendiri maupun pemerintah dalam pengembangannya. Oleh karena itu untuk mengembangkan wakaf secara produktif, Dayar selaku pengurus PD Muhammadiyah mengatakan bahwa, "Dalam lembaga harus didirikan sebuah Badan Usaha yang dapat menggerakkan jalannya perekonomian terutama dibidang kewirausahaan seperti Koperasi". Begitu juga dibidang pertanian maupun peternakan. Pengelolaan wakaf di PD Muhammadiyah sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif meskipun belum optimal. Sebagai contoh di masing-masing Pimpinan Cabang Muhammadiyah sudah didirikan Badan Usaha Koperasi yang dikelola oleh masing-masing Pimpinan Cabang Muhammadiyah, tempat koperasi ini berada dimasing tanah wakaf yang dibangun sekolah, akan tetapi dari masing-masing pimpinan cabang tidak pernah melaporkan data-data perkembangan koperasi tersebut kepada PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil wawancara djumari (2020), selain itu hasil wawancara dari Sirwandi, S.Pdi selaku pengurus PC Muhammadiyah Kecamatan Cerenti, beliau berkata bahwa, "Pengelolaan wakaf di PC Muhammadiyah yang terletak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sudah bisa masuk dalam kategori pengelolaan wakaf produktif karena memiliki letak yang strategis berada di tepi jalan raya dan sarana prasarana mendukung".

Menurut departemen agama RI, pada saat ini pola menejemen pengelolaan wakaf yang berjalan adalah pengelolaan wakaf yang masih bersifat konsumtif. Hal ini bisa diketahui melalui beberapa aspek antara lain:

- a. Kepemimpinan. Dimana corak kepemimpinan di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi menurut penulis masih bersifat sentralistik serta belum adanya sistem kontrol dari pihak pemerintah
- b. Operasional pemberdayaan wakaf. Operasional pemberdayaan wakaf yang dijalankan PD Muhammadiyah selama ini banyak yang bersifat konsumtif.

Sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf tersebut serta belum memiliki standar operasional yang jelas.

Dari data yang penulis sajikan di muka, lembaga wakaf yang ada di PD Muhammadiyah belum optimal mengelola aset wakaf kearah produktif. Langkah-langkah yang dilakukan pengurus masih pada program sertifikasi tanah wakaf dan penanaman aqidah pada masyarakat seperti acara keagamaan, pelatihan-pelatihan, dakwah, dan lain-lain. Pengelolaan tanah wakaf di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas tanah wakafnya di manfaatkan untuk kebutuhan konsumtif seperti masjid, musholla, pesantren, pemakaman, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi menurut penulis di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi Agar tanah wakaf di PD Muhammadiyah tetap memberikan manfaat kepada penerima wakaf. Maka perlu adanya tekad bulat dari semua pihak untuk bekerjasama dalam mengembangkannya secara produktif. Langkah-langkah yang harus dilakukan PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain adalah:

- a. Pihak PD Muhammadiyah Kuantan Singingi melaksanakan pembinaan terhadap nazhir-nazhir cabang dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang ada di setiap kecamatan dengan bekerjasama dengan pihak Deprtemen Agama Kabupaten.
- b. Mengadakan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan harta-harta yang dapat diwakafkan bahwasanya tidak hanya benda tidak bergerak melainkan benda bergerakdapat diwakafkan
- c. Mengajak kepada lembaga-lembaga keuangan untuk menjalin kerjasama dalam mengelola perwakafan agar dapat meningkatkan potensi dan kualitas hasil yang lebih baik.

Berdasarkan data dan temuan hasil penelitian ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf di Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi dan kaitannnya dengan wakaf produktif adalah:

- a. Dilihat dari kondisi geografis letak Badan Perwakafan Muhammadiyah sangat strategis. Maka dengan letak yang strategis tersebut memudahkan masyarakat serta para pengurus untuk mengakses informasi dan mempromosikan program kerjanya pada masyarakat seperti program sertifikat tanah wakaf gratis yang telah berjalan pada tahun yang lalu.
- b. Dilihat dari segi pendidikan banyak pengurus yang memiliki ilmu pengetahuan tentang Islam dan yang menyandang gelar sarjana baik ditempuh di pesantren maupun Universitas

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan wakaf produktif di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan data dan hasil pengamatan selama penelitian ada beberapa faktor yang mendukung pengelolaan wakaf di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

- a. Dilihat dari kondisi geografis letak PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi sangat srategis. Maka memudahkan para pengurus untuk mengakses informasi dan mempromosikan program kerjanya pada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk melaksanakan ibadah wakaf dan masyarakat semakin memahami pentingnya

ibadah wakaf karena selain berdimensi ubudiyah ilahiyah juga berfungsi sosial masyarakat.

- b. Sudah adanya Badan Usaha Koperasi yang ada di masing-masing PC Muhammadiyah di setiap Kecamatan terutama dikelola oleh masing-masing sekolah.
- c. Dengan memiliki asset wakaf yang tersebar di masing-masing PC Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga ini menjadi peluang untuk mengelola wakaf secara produktif dimana aset tersebut dapat dijadikan sebagai modal usaha dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.
- d. Dilihat dari segi pendidikan pengurus PD Muhammadiyah banyak yang menyandang gelar sarjana dan yang berpengetahuan ilmu pengetahuan tentang Islam baik yang di tempuh dari Pesantren maupun Universitas.

Faktor yang penghambat dalam pengelolaan wakaf produktif di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun yang menghambat pengelolaan wakaf di PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Meskipun tanah wakaf yang ada di PD Muhammadiyah sangat luas yaitu 602,422 M² yang tersebar di 15 cabang tetapi tidak semuanya dikategorikan tanah wakaf yang strategis dan produktif. Hal ini bisa dilihat dari lokasi dan kondisi tanah. Apabila lokasinya berada di tepi jalan, pusat perkotaan, pusat perbelanjaan. Maka memungkinkan untuk dikelola secara produktif tetapi apabila lokasinya di pedalaman desa dan secara otomatis sulit untuk diproduktifkan. Menurut Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi, "Agus Mandar" ada beberapa tanah wakaf yang berada di Desa-Desa seperti kecamatan kuantan mudik, Hulu Kuantan itu bisa masuk dalam kategori tanah yang tidak strategis dan produktif sebab letaknya berada diujung kota dan berada di pedalaman dan selain jauhnya jangkauan/akses kita kesana tanah, juga lokasi untuk pengembangan tanah wakaf tersebut juga jauh dari keramaian (wawancara zain muhammadiyah, 2020).
- b. Belum adanya Bantuan keuangan secara terstruktur dalam hal pengembangan perwakafan, baik dari PP Muhammadiyah, maupun APBD Kabupaten. Masih banyaknya pemahaman para nazhir wakaf di ranting-ranting yang tradisional dan cenderung konsumtif dalam mengelola harta wakaf. Sehingga tidak heran kalau pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, panti asuhan, pesantren, pemakaman, dan lain-lain.
- c. Tanah wakaf yang belum bersertifikat. Hal ini dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat, jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap rumit dan memerlukan waktu yang lama. Dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus PD Muhammadiyah bapak Dedi berkata, "Tanah wakaf yang belum bersertifikat (masih dalam proses sertifikat) di PD Muhammadiyah masih ada 62 lokasi yang belumbersertifikat". Sehingga tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu belum bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitas bahkan rawan konflik.
- d. Terbatasnya dana untuk melakukan pengembangan wakaf secara produktif, baik ditingkatan Pimpinan Cabang, maupun dipimpinan daerah.

SIMPULAN

Sistem pengelolaan wakaf di Badan Perwakafan Muhammadiyah kaitannya dengan wakaf produktif seperti wakaf uang, obligasi, saham, dan hak sewa belum berjalan dengan baik. Wakaf yang ada di Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi berupa wakaf tanah yang mayoritas pengelolaannya digunakan untuk tempat ibadah berupa Masjid, Mushalla, lembaga pendidikan, pesantren, pemakaman. Faktor yang mendukung dalam pengelolaan wakaf produktif di Badan Perwakafan Muhammadiyah Kabupaten Kuantan Singingi adalah dapat dilihat dari letak geografis Badan Perwakafan Muhammadiyah yang memudahkan untuk mengakses informasi dan mengenalkan program kerjanya pada masyarakat. Adapun faktor penghambatnya adalah lamanya proses sertifikat tanah wakaf yaitu sekitar 6 bulan sampai satu tahun dan sengketa tanah, belum adanya nazhir-nazhir ranting yang memiliki potensi dalam mengelola wakaf secara produktif karena pengetahuan yang minim, terbatasnya dana untuk mengembangkan tanah wakaf secara produktif karena belum berjalannya wakaf tunai yang pemanfaatannya bisa digunakan sebagai modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djunaidi, Ahmad dkk. (2007). "Menuju Era Wakaf Produktif". Limo Depok: Mumtaz Publishing.
- Bakhri, Amirul dan Srifariyati. (2017). "Peran Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi". Jurnal Madaniyah, Vol. 1 Edisi XII Januari.
- Fuady, Munir. (2005). "Pengantar Hukum Bisnis". Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Halim, Abdul. (2005). "Hukum Perwakafan di Indonesia". Ciputat Press: Ciputat.
- Mayasari, Hilda Gita & Qulub, A. Syifa'ul. (2019). "Identifikasi Wakaf Produktif Pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lumajang". Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 6 Juni. Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga.
- Karim, Helmi. (1997). "Fiqih Muamalah". Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kartika Sari, Elsi. (2006). "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf". Jakarta: PT Grafindo.
- Kementerian Agama RI. (2014). "Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai". Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Khaf, Munzir. (20015). "Manajemen Wakaf Produktif". Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group.
- Oktriani, Linda. (2017). "Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu. Skripsi: Institut Agam Islam Negeri Bengkulu.
- Mannan, M.A. (2001). "Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam". Jakarta: Cyber PKTTI-UI.